



**LAPORAN AKTUALISASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**STRATEGI PENINGKATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PALEMBANG**

Oleh :

MUHAMMAD IRFAN TAWAKIB LUBIS, S.STP., M.Si.

NIP. 199706052018081002

NDH : 40

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV
TAHUN 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK**

**STRATEGI PENINGKATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG**

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN TAWAKIB LUBIS, S.STP., M.SI

NIP. 199706052018081002

NDH : 40

Telah disetujui diseminarkan pada : -

Hari/Tanggal : 08 Desember 2025

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

MENTOR,

Ir. TRI YUSNANIE, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA / IV C

NIP. 196804111994032006

Tris Septiawan, S.STP., M.H

PEMBINA TINGKAT I / IV.b

NIP. 198109242000121001

Menyetujui :

a.n Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Bidang Manajerial

Tri Hartati, SE., M.Si

PEMBINA/ IV.a

NIP. 197212192006042006

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI AKSI PERUBAAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK**

**STRATEGI PENINGKATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG**

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN TAWAKIB LUBIS, S.STP., M.SI

NIP. 199706052018081002

NDH : 40

Telah disetujui diseminarkan pada : -

Hari/Tanggal : 09 Desember 2025

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

MENTOR,

Ir. TRI YUSNANIE, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA / IV C

NIP. 196804111994032006

Tris Septiawan, S.STP., M.H

PEMBINA TINGKAT I / IV.b

NIP. 198109242000121001

Menyetujui :

a.n Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Bidang Manajerial

Tri Hartati, SE., M.Si

PEMBINA/ IV.a

NIP. 197212192006042006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan ini dengan judul **“Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang”**. Penulisan Aktualisasi Aksi Perubahan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang;
3. Kepala Bidang Manajerial BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Tri Hartati, SE., M.Si.
4. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Bapak Tris Septiawan, S.STP., M.H. selaku Mentor.
5. Ibu Ir. Tri Yusnane, M.Si selaku Coach yang membimbing dan pendampingan dalam menyusun Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan.
6. Seluruh Widyaiswara dan Tim Panitia PKP Angkatan IV BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
7. Seluruh Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
8. Rekan-Rekan Peserta PKP Angkatan IV Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan.
9. Semua Pihak yang ikut membantu tersusun Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan.

Semoga Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan ini bermanfaat bagi penulis, instansi tempat bekerja dan Masyarakat.

Palembang, Desember 2025
Peserta,

Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si.
NIP. 199706052018081002
NDH : 40

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik.....	II
Lembar Pengesahan Laporan Aktualisasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik.....	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	V
Daftar Tabel	VI
Daftar Bagan	VII
Daftar Gambar	VIII
Ringkasan Eksekutif.....	IX
BAB I RANCANGAN AKSI PERUBAHAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	4
C. Manfaat Aksi Perubahan	5
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	7
E. Analisis Masalah	8
F. Strategi Penyelesaian Masalah	12
BAB II DEKSRIPI PROSES KEPEMIMPINAN.....	8
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan.....	8
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan IT).....	10
C. Pengelolaan Tim	11
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	16
A. Capaian Dan Perbaikan Kinerja Pelayanan.....	16
B. Manfaat Aksi Perubahan	21
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	22
BAB IV KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	25
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	28
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	35
A. Penerapan Strategi Komunikasi	35
B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/ Replikasi Aksi Perubahan	36
BAB VII PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	38
A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	38
B. Proses dan Progress / Hasil	40
BAB VIII PENUTUP.....	42
A. Simpulan	42
B. Saran	43
LAMPIRAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Analisis Metode USG	10
Tabel 1.2 Hasil Analisis Permasalahan dengan Metode USG	10
Tabel 1.3 Milestone Jangka Pendek (3 Bulan).....	1
Tabel 1.4 Milestone Jangka Menengah (1 Tahun)	3
Tabel 1.5 Milestone Jangka Panjang (1 - 2 Tahun).....	1
Tabel 1.6 Strategi Pengembangan Kompetensi	6
Tabel 2.1 Peran dan Tugas masing - masing anggota Tim	13
Tabel 3.1 Rencana Pengembangan Kompetensi Diri.....	24
Tabel 5.1 Mata Pelatihan yang dipilih oleh Action Leader.....	28
Tabel 7.1 Rencana Strategi Potensi Pengembangan Diri.....	40

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Pembentukan Tim Efektif	12
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram <i>Fishbone</i>	11
Gambar 1.2 Analisis <i>Stakeholders</i> dengan Mandelow's Matrix	4
Gambar 1.3 Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) pada Manajemen Mutu	6
Gambar 2.1 Dokumentasi Penyusunan Tim Efektif Aksi Perubahan.....	10
Gambar 2.2 Foto Rapat Persiapan Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penyusunan RKA pada DPKP	14
Gambar 2.3 Foto SK Tim EFektif	15
Gambar 3.1 Foto Konsultasi dengan Mentor terkait Implementasi Aksi Perubahan	16
Gambar 3.2 Dokumentasi Foto/Video dan Surat Dukungan.....	18
Gambar 3.3 Dokumentasi Foto/Video dan Surat Dukungan.....	19
Gambar 3.4 SK Tim Efektif Aksi Perubahan	20
Gambar 3.5 Dokumentasi Foto/Video dan Surat Dukungan.....	21
Gambar 4.1 Surat Komitmen Tindak Lanjut Aksi Perubahan.....	27
Gambar 5.1 Sertifikat Siap Hadapi Tantangan Dinamis.....	32
Gambar 5.2 Sertifikat Inovasi.....	34
Gambar 7.1 Rekap Nilai Peserta	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aksi perubahan ini disusun untuk meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, yang memiliki peran strategis dalam memastikan ketertiban umum dan pelayanan tanggap darurat bagi masyarakat. Evaluasi awal menunjukkan bahwa penyusunan RKA belum berjalan optimal karena adanya kendala seperti kurangnya sinkronisasi antar unit kerja, pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum maksimal, serta sering berubahnya pagu indikatif dan kebijakan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada revisi berulang, keterlambatan proses penganggaran, dan kurang tepatnya alokasi anggaran terhadap kebutuhan riil operasional.

Melalui analisis USG, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya penyusunan RKA, sehingga diperlukan strategi yang terarah untuk memperbaiki proses tersebut. Aksi perubahan dirancang dengan beberapa inovasi, antara lain penerapan template RKA terstandar, digitalisasi penyusunan melalui platform daring yang memungkinkan kolaborasi real-time, pembentukan Tim Efektif lintas unit, serta penyelenggaraan pelatihan teknis penyusunan RKA dan penggunaan aplikasi SIPD. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyusunan yang lebih terstruktur, akurat, dan sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Kegiatan implementasi dilakukan dalam tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan konsultasi dengan mentor dan pimpinan OPD serta pembentukan Tim Efektif sebagai penggerak utama perubahan. Tahap pelaksanaan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar bidang, serta optimalisasi pemanfaatan SIPD. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghimpun masukan, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan penyempurnaan berkelanjutan dalam proses penyusunan RKA.

Aksi perubahan ini memberikan dampak signifikan bagi organisasi, aparatur, dan masyarakat. Bagi organisasi, penyusunan RKA menjadi lebih efisien, tepat waktu, dan terintegrasi sehingga mendukung peningkatan kinerja pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Bagi pegawai, peningkatan kompetensi teknis dan kolaborasi antar unit turut memperkuat produktivitas dan kualitas kerja. Secara lebih luas, pemerintah daerah memperoleh dokumen anggaran yang lebih akuntabel dan berbasis kinerja,

sementara masyarakat mendapatkan manfaat berupa pelayanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan lapangan. Dengan keberlanjutan yang dirancang hingga jangka panjang, aksi perubahan ini diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif.

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kota Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dan kota besar yang terus berkembang, menghadapi kompleksitas tinggi dalam hal pelayanan tanggap darurat kebakaran. Kepadatan penduduk yang tinggi, permukiman informal yang tidak terencana, serta lemahnya infrastruktur penduduk seperti akses jalan dan sarana pemadam kebakaran menyebabkan pelayanan publik dalam bidang kebakaran masih menghadapi berbagai hambatan serius. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemerintahan yang terukur dan adaptif. Pelayanan publik dalam pemerintahan modern harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan berbasis konteks lokal, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan respons waktu nyata (*real time- response*). Oleh karena itu, penyediaan layanan tanggap kebakaran tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga strategi pemerintahan yang terintegrasi dengan karakteristik sosial dan geografis wilayah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, struktur organisasi dinas ini terdiri atas beberapa unsur pelaksana dan penunjang yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kedinasan. Unsur pimpinan

tertinggi adalah Kepala Dinas, yang dibantu oleh Sekretariat dan empat bidang teknis, yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman, Bidang Penyelamatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana. Sekretariat sendiri membawahi tiga Sub Bagian, yakni Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Dari ketiga sub bagian tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan memegang peranan penting dalam mendukung perencanaan strategis instansi, termasuk penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan, serta penyusunan anggaran. Sub bagian ini menjadi tulang punggung dalam memastikan setiap kegiatan dinas berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan alokasi sumber daya yang telah dirancang secara sistematis dan terukur.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dijadikan pedoman penyusunan RKA. Proses Pendekatan dan Pedoman Penyusunan RKA di antaranya adalah:

1. Penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
 - b. Penganggaran Terpadu; dan
 - c. Penganggaran Berbasis Kinerja.
2. RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran.
3. Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen :
 - a. Indikator Kinerja;
 - b. Standar Biaya; dan
 - c. Evaluasi Kinerja.

Sebagai dasar hukum, penyusunan RKA juga berlandaskan pada beberapa regulasi penting, antara lain : Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Selain itu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diperlukan upaya untuk sinkronisasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pemerintahan daerah, optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang perlu diarahkan agar sejalan dengan **Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia**, khususnya:

- a) Asta Cita 4 "Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas" yang berkaitan dengan:
 - Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana anggaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.
 - Mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pelacakan anggaran.
 - Mendukung pengembangan sistem pendukung tanggap kebakaran yang berbasis teknologi dan SDM profesional.
- b) Asta Cita 7 "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan" yang berkaitan dengan:
 - Menekankan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi, termasuk dalam proses penyusunan RKA.
 - Mendorong reformasi sistem perencanaan dan penganggaran agar transparan, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.
 - Sejalan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 2023.
- c) Asta Cita 8 "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" yang berkaitan dengan:

- Menyentuh aspek kebijakan anggaran yang mendukung lingkungan hidup, termasuk mitigasi bencana kebakaran sebagai bagian dari ketahanan kota.
- Mendorong penyusunan RKA yang berwawasan lingkungan, khususnya untuk pengadaan sarana-prasarana dan sistem mitigasi kebakaran.

Selain mengacu pada *Asta Cita* Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga selaras dengan visi dan misi Kota Palembang, yaitu ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif"***. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Dengan pendekatan ini, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan bersifat akuntabel, profesional, serta mencerminkan kolaborasi yang solid dari tim penyusun yang telah mengumpulkan data dan masukan secara komprehensif. Hasil akhirnya adalah dokumen perencanaan anggaran yang kompatibel dengan kebutuhan lapangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan efektif.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

1. Tujuan Jangka Pendek (3 bulan)

- a) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis tentang penyusunan RKA sesuai dengan Permendagri dan standar akuntabilitas keuangan daerah
- b) Membentuk tim khusus penyusunan RKA lintas bidang/unit untuk mempercepat konsolidasi dan sinkronisasi antara data dan program yang diperlukan untuk penyusunan RKA

2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan - 1 Tahun) :

- a) Meningkatkan kualitas penyusunan RKA berbasis data dan kebutuhan riil agar program lebih tepat sasaran dan sesuai prioritas daerah.
- b) Menyempurnakan sistem dan prosedur penyusunan RKA yang efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengintegrasikan hasil evaluasi.
- c) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPD dan menetapkan rekomendasi kebijakan internal untuk mendukung perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Tujuan Jangka Panjang (1 - 2 Tahun)

- a) Terciptanya sistem penyusunan RKA yang terintegrasi dengan perencanaan strategis daerah dan kebutuhan riil operasional lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- b) Meningkatkan Kualitas RKA sehingga lebih akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektivitas anggaran
- c) Mendukung tercapainya kinerja OPD melalui optimalisasi anggaran, yang akhirnya berkontribusi terhadap pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang lebih cepat, tepat dan efektif bagi masyarakat Kota Palembang

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, aksi perubahan menjadi langkah strategis yang sangat penting. Aksi perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki proses teknis penyusunan anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas. Dengan adanya optimalisasi tersebut, diharapkan dapat tercipta perencanaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta prioritas pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, aksi ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga

meningkatkan tata kelola organisasi secara keseluruhan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat bagi Organisasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang)
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan RKA, sehingga anggaran yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional dan prioritas pelayanan.
 - Meminimalkan kesalahan dalam penginputan data dan dokumen RKA melalui penerapan mekanisme yang lebih sistematis dan terstandar.
 - Mendorong sinkronisasi program dan kegiatan antar subbagian/unit di lingkungan Dinas, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
 - Mempercepat proses penyusunan dan penyampaian RKA kepada BPKAD, yang berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan anggaran.
2. Manfaat bagi Pegawai / Internal OPD
 - Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menyusun RKA sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan SIPD).
 - Mengurangi beban kerja yang bersifat administratif akibat revisi berulang akibat kesalahan teknis atau ketidaksesuaian dokumen.
 - Mendorong budaya kerja yang lebih kolaboratif dan berbasis perencanaan kinerja.
3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
 - Mendukung penyusunan APBD Kota Palembang yang lebih berkualitas karena RKA dari perangkat daerah tersusun secara optimal dan akuntabel.
 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

- Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

4. Manfaat bagi Masyarakat

- Secara tidak langsung, optimalisasi RKA akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- Masyarakat akan memperoleh layanan yang lebih tepat sasaran karena anggaran dialokasikan secara lebih rasional dan berdasarkan kebutuhan riil lapangan.

D. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN

Ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan ini dilaksanakan dalam tiga tahap utama, yang mencakup kegiatan sebagai berikut :

Persiapan:

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam penyusunan RKA, pengumpulan data pendukung, serta penyusunan aktualisasi aksi dan strategi optimalisasi. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai yang terlibat agar memahami tujuan dan manfaat dari aksi perubahan ini.

Implementasi:

Tahap implementasi meliputi pelaksanaan pelatihan bagi pegawai terkait penyusunan RKA, peningkatan koordinasi antar unit kerja, optimalisasi pemanfaatan sistem SIPD, serta penyusunan dan validasi dokumen RKA sesuai dengan pedoman dan prioritas daerah. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengacu pada standar prosedur yang berlaku.

Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan proses penyusunan RKA berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target optimalisasi. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul serta

melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna menjamin kualitas dokumen RKA dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

E. ANALISIS MASALAH

1. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan dengan Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang diantaranya :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - c. pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;
 - g. persiapan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
 - h. penyusunan laporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Berikut hasil diskusi dengan mentor beserta staff di Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Action Leader berhasil menemukan beberapa masalah yang dikaitkan antara tupoksi dan penyusunan RKA yang dianggap belum secara optimal, sehingga disimpulkan beberapa isu permasalahannya antara lain :

1. Pagu Indikatif yang kerap berubah
2. Perubahan Kebijakan di tingkat Daerah
3. Masalah pada server SIPD
4. Kurangnya komunikasi antar OPD
5. Keterbatasan Waktu Penyusunan

2. Kondisi yang Diharapkan

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka kondisi yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya tim khusus penyusunan RKA lintas bidang/unit untuk mempercepat konsolidasi dan sinkronisasi antara data dan program yang diperlukan untuk penyusunan RKA
2. Tercapainya kualitas penyusunan RKA berbasis data dan kebutuhan riil agar program lebih tepat sasaran dan sesuai prioritas daerah.
3. Terintegrasi sistem dan prosedur penyusunan RKA yang efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengintegrasikan hasil evaluasi.
4. Dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPD dan menetapkan rekomendasi kebijakan internal untuk mendukung perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Tercapainya kinerja OPD melalui optimalisasi anggaran, yang akhirnya berkontribusi terhadap pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang lebih cepat, tepat dan efektif bagi masyarakat Kota Palembang

3. Analisa USG

Dengan rumusan permasalahan tersebut, *action leader* melakukan analisa prioritas masalah yang dianggap paling dominan / urgent dengan

menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang dikenalkan oleh Edward W. Clendenin pada tahun 1978 dan juga Analisis faktor penyebab core issue menggunakan diagram fishbone yaitu diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu masalah.

Metode USG adalah salah satu teknik penilaian yang menggunakan skala likert dari 1 sampai 5, sehingga dapat ditentukan skor serta tingkat pengaruhnya sebagai berikut :

1. *Urgency* (U): Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu.
2. *Seriousness* (S): Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru; dan
3. *Growth* (G): Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan

Dalam metode USG nilai dengan score tertinggi akan menjadi fokus isu yang selanjutnya dibuat gagasan penyelesaiannya. Tabel scoring Analisa Likert dalam metode USG adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Analisis Metode USG

ANGKA	PENGARUH
1	Sangat Rendah
2	Rendah
3	Sedang
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

Pemanfaatan metode USG dalam memetakan keempat permasalahan digunakan untuk menetapkan skala prioritas, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil Analisis Permasalahan dengan Metode USG

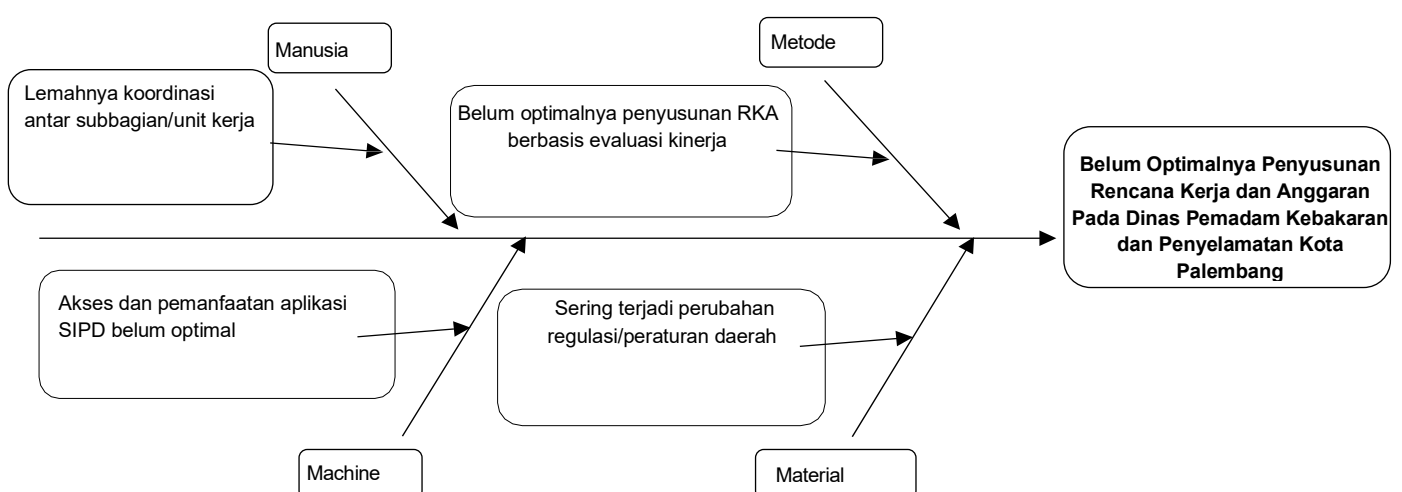
NO	ISU STRATEGIS/ MASALAH	NILAI			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1	Belum optimalnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang	5	5	5	15	I

2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pelaporan	5	4	5	14	II
3	Ketidaksinkronan antara RKA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Renstra, Renja, RKPD)	5	4	4	13	III
4	Belum tersosialisasinya Aplikasi penyusunan RKA yang baru sehingga mengakibatkan beban kerja Subag Program dan keuangan menjadi bertambah	4	3	4	11	IV

dari masalah tersebut diatas dilakukan pembobotan dengan menggunakan skala likert. Hasil pembobotan diatas menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah **Belum Optimalnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang** karena memiliki skor nilai tertinggi dan berada pada peringkat prioritas 1 (Pertama).

4. Faktor Penyebab Masalah

Terhadap isu utama dilakukan analisa faktor penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram *Fishbone*

5. Dampak Masalah

Kurangnya optimalisasi dalam penyusunan RKA dapat menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik secara teknis, administratif, maupun strategis. Secara teknis, RKA yang disusun tanpa perencanaan matang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini berpotensi mengakibatkan kegiatan tidak berjalan efektif atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena kekeliruan alokasi anggaran.

Secara administratif, kelemahan dalam penyusunan RKA sering menimbulkan revisi berulang, keterlambatan input data dalam sistem, serta ketidaksesuaian dokumen dengan regulasi yang berlaku, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 atau SIPD. Kondisi ini menambah beban kerja, memperlambat proses penetapan anggaran, dan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dari sisi strategis, perencanaan yang lemah berdampak pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran dan tidak tercapainya output maupun outcome kegiatan yang diharapkan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik, terutama dalam sektor tanggap darurat seperti pemadaman kebakaran dan penyelamatan, yang sangat bergantung pada kecepatan, ketersediaan sarana, dan kesiapan operasional.

F. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. Terobosan/Inovasi

Sebagai respons terhadap permasalahan kurang optimalnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, yang selama ini dihadapkan pada berbagai kendala seperti tidak seragamnya format dokumen antarunit, lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan penyusunan data kegiatan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses penyusunan dan pelaporan, maka aksi perubahan ini dirancang untuk memberikan solusi yang konkret dan aplikatif. Inovasi yang ditawarkan meliputi penerapan format template RKA yang terstandar guna mengurangi variasi dan

kesalahan input, digitalisasi proses penyusunan melalui pemanfaatan platform daring untuk kerja kolaboratif secara real-time, pembentukan tim penyusun lintas unit kerja agar proses berjalan lebih terkoordinasi, serta penyelenggaraan forum rapat rutin sebagai wadah komunikasi dan penyampaian masukan dari lapangan. Seluruh langkah ini diharapkan mampu mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi, sekaligus menghasilkan dokumen RKA yang lebih sistematis, efisien, dan selaras dengan kebutuhan aktual serta kebijakan strategis organisasi.

1. Penerapan Format Template RKA Terintegrasi

Membuat format baku (template) RKA yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan, sehingga setiap unit kerja menggunakan standar yang sama agar dapat mengurangi kesalahan input dan mempercepat proses rekapitulasi laporan.

2. Digitalisasi Penyusunan dan Pelaporan RKA

Mengembangkan atau memanfaatkan aplikasi sederhana berbasis spreadsheet online (seperti Google Sheets atau aplikasi internal) yang memungkinkan penyusunan dan pelaporan dilakukan secara real-time dan kolaboratif.

3. Pembentukan Tim Penyusun RKA

Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja dalam proses penyusunan RKA agar berjalan sistematis dan terkoordinasi.

4. Penyelenggaraan Forum Rapat Koordinasi

Mengadakan forum rapat rutin yang melibatkan petugas lapangan dan tim penyusun untuk menyampaikan kendala dan masukan secara langsung, sehingga penyusunan RKA dapat dilakukan secara terintegrasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

2. Milestone Kegiatan

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang akan dilakukan, maka tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Milestone Jangka Pendek (3 Bulan)

No.	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence / Output	Waktu
A. TAHAP PERSIAPAN				
1	Melaksanakan Konsultasi dengan Mentor	- Menemui dan menghadap mentor - Meminta dukungan mentor - Meminta arahan mentor	- Surat dukungan - Laporan hasil konsultasi (arahan) - Foto/Vidio dokumentasi	Minggu ke 4 Bulan September 2025
2	Membentuk Tim Efektif	- Menyusun daftar tim efektif - Menyampaikan daftar kepada mentor - Menyampaikan dan meminta persetujuan kepala OPD	- daftar tim efektif - draft keputusan - Tim efektif - SK Tim efektif - Foto dan Vidio dokumentasi	Minggu ke 1 Bulan Oktober 2025
3	Melaksanakan rapat tim efektif	- Membuat surat undangan, daftar hadir dan bahan rapat - Membagikan surat undangan - Penyusunan jadwal Kegiatan - Pembagian tugas	- Surat undangan - Daftar hadir - Bahan rapat - Notulen rapat - Foto/Vidio dokumentasi	Minggu ke 3 Bulan Oktober 2025
B. TAHAP PELAKSANAAN				
4	Mengadakan pertemuan koordinasi untuk melakukan Pelatihan	- Membuat surat permohonan koordinasi - melakukan pengumpulan data awal dengan	- Surat permohonan koordinasi - Notulensi Pelatihan Teknis - Materi Pelatihan	Minggu ke 4 Bulan Oktober 2025

	Teknis Penyusunan RKA	mengadakan forum rapat untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam penyusunan RKA • Melakukan penyusunan materi pelatihan bersama narasumber • Menentukan narasumber	4. Surat Tugas Peserta 5. Penunjukkan Narasumber 6. Foto/Vidio dokumentasi	
5	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Penyusunan RKA	• Mengadakan koordinasi dengan narasumber / instruktur pelatihan • Mendistribusikan materi pelatihan kepada peserta • Persiapan absensi, daftar hadir, dan evaluasi kegiatan • Penyampaian hasil pelatihan dan kesimpulan materi • Penyerahan Sertifikat	1. BA Pelatihan Teknis Penyusunan RKA 2. Distribusi Materi Pelatihan 3. Sertifikat 4. Foto/Video dokumentasi	Minggu ke 4 Bulan November 2025
C. TAHAP EVALUASI				

6	Perbaikan dan Finalisasi RKA	- Menyebarkan kuisioner untuk mengukur peningkatan dan kepuasan peserta terkait dengan materi pelatihan - Menerima masukan yang diterima baik dari pihak internal maupun eksternal untuk menjadi bahan evaluasi kegiatan pelatihan selanjutnya	- Laporan Pertanggung Jawaban Pelatihan - Foto/Video dokumentasi	Minggu ke 1 Bulan Desember 2025
---	------------------------------	---	---	---------------------------------

Tabel 1.4 Milestone Jangka Menengah (1 Tahun)

No.	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence / Output	Waktu
1	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan RKA, termasuk kesesuaian program dengan kebutuhan operasional dan prioritas daerah.	- Menyusun kriteria dan indikator evaluasi (misalnya: efisiensi anggaran, keterkaitan program dengan tupoksi, output dan outcome program). - Mengumpulkan dokumen RKA tahun berjalan dan tahun sebelumnya (RKA, Renja, DPA). - Menilai sejauh mana program/kegiatan dalam RKA sesuai	- Dokumen hasil evaluasi penyusunan RKA. - Dokumen rekomendasi penyempurnaan sistem dan prosedur penyusunan RKA.	Bulan November 2025

		dengan kebutuhan operasional riil (misalnya: jumlah armada, kebutuhan alat pelindung diri, pelatihan personel).		
2	Menyusun dokumen rekomendasi perbaikan proses penyusunan RKA berbasis hasil evaluasi.	• Mengelompokkan temuan evaluasi ke dalam isu-isu strategis, misalnya ketidaksesuaian program dengan prioritas, Kelemahan dalam penggunaan aplikasi SIPD. • Menyusun beberapa alternatif solusi untuk setiap permasalahan yang ditemukan.	1. Dokumen hasil evaluasi penyusunan RKA. 2. Dokumen rekomendasi penyempurnaan sistem dan prosedur penyusunan RKA.	Bulan Desember 2025

Tabel 1.5 Milestone Jangka Panjang (1 - 2 Tahun)

No.	Milestone/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Evidence / Output	Waktu
1	Membuat Pelaporan Hasil Monitoring	- Menyusun laporan berkala hasil monitoring penyusunan RKA. - Mendorong tindak lanjut terhadap temuan monitoring.	- Laporan hasil monitoring - Tindak lanjut yang terukur.	Bulan Januari 2026
2	Evaluasi Efektivitas Sistem Monitoring	- Mengukur efektivitas sistem monitoring yang telah diterapkan tahun sebelumnya. - Melakukan penyesuaian terhadap indikator atau prosedur jika diperlukan.	Ketepatan penyusunan RKA secara terukur	Bulan Maret 2026

3. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang yaitu :

- Kepala Dinas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- Tim Eksekutif dan Jajaran staf bagian Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- Unsur dinas terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Dimana untuk penyelesaian masalah perlu dilakukan identifikasi *stakeholder*. Analisa *Stakeholder* adalah langkah penting untuk melaksanakan aksi perubahan yang telah direncanakan karena memiliki peran berupa memberikan inspirasi untuk bagaimana tim bekerja sama dengan jajaran *stakeholder* yang memiliki berbagai tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda.

Stakeholder merujuk pada individu, kelompok, atau institusi yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas, proses operasional, maupun hasil dari suatu entitas yang bersifat abstrak atau tidak berwujud. Para pemangku kepentingan ini dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat keterlibatan, pengaruh, serta dampak yang mereka terima atau berikan. Dalam konteks aksi perubahan yang dibahas, *stakeholder* yang terlibat meliputi:

- a. Kepala BPKAD Kota Palembang
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kota Palembang
- c. Kepala Bidang Anggaran Daerah BPKAD Kota Palembang
- d. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Palembang
- e. Kepala Dinas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- f. Sekretaris Dinas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- g. Jajaran Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- h. Jajaran Kasubbag Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- i. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
- j. Tim Eksekutif Penyusunan RKA
- k. Masyarakat Umum

Untuk memastikan bahwa setiap stakeholder dapat menjalankan perannya secara efektif dan optimal, dilakukan pemetaan peran berdasarkan tingkat

pengaruh dan kepentingan mereka terhadap rencana aksi perubahan. Setiap stakeholder dikelompokkan ke dalam empat (4) kategori yaitu :

a. Promotor

Memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).

b. Devenders

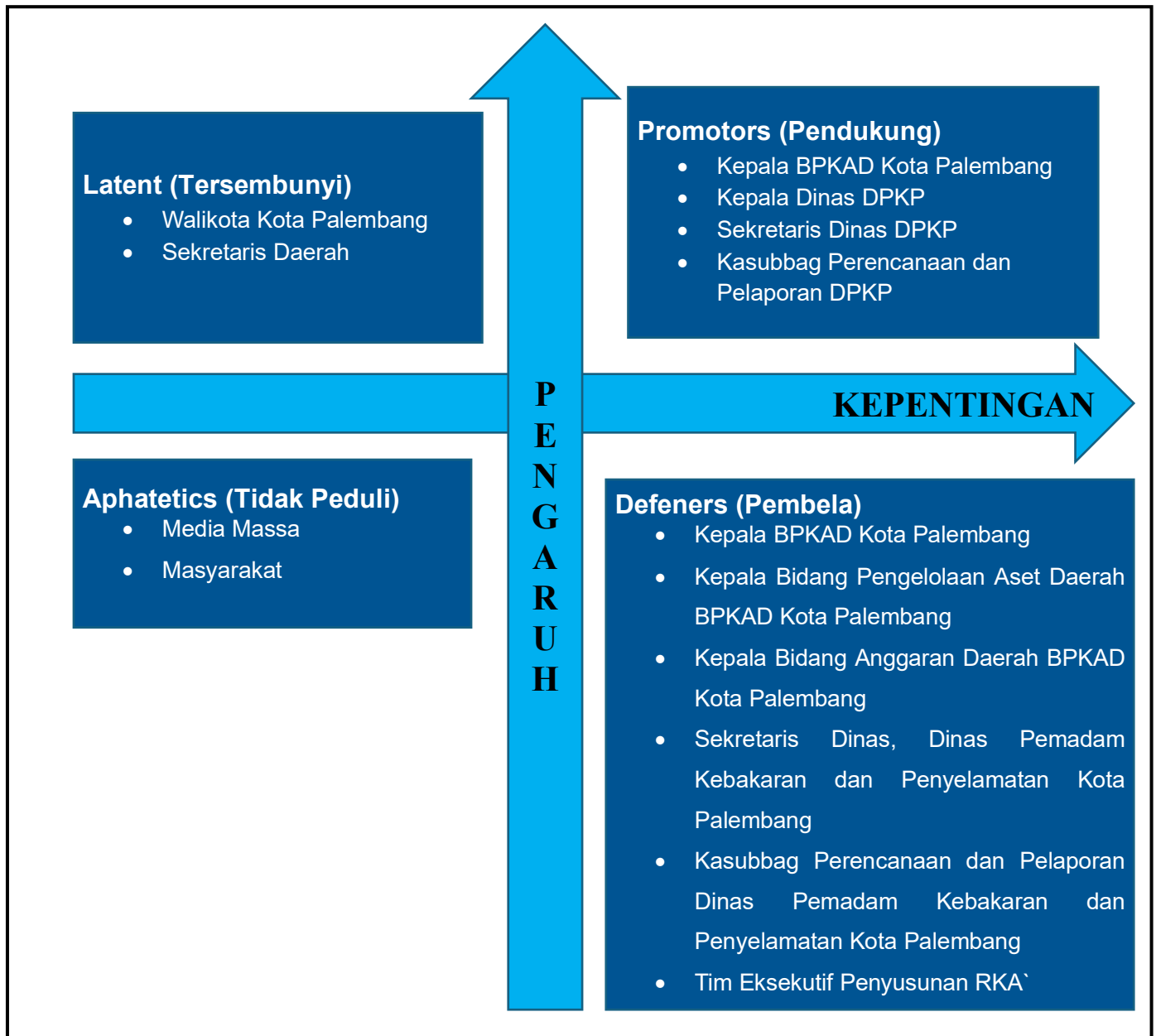
Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatannya

c. Laten

Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.

d. Apathetic

Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan



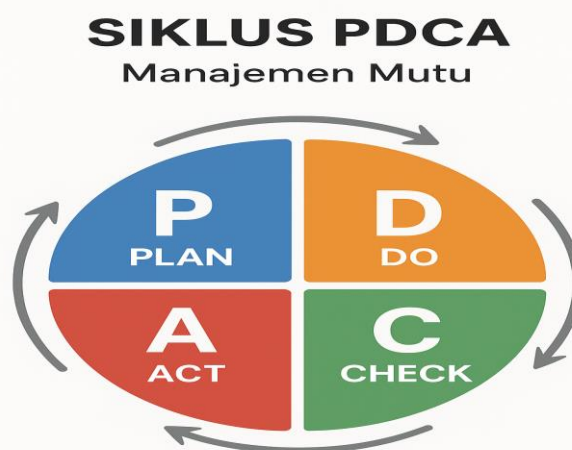
Gambar 1.2 Analisis *Stakeholders* dengan Mandelow's Matrix

4. Pengendalian Mutu Pekerjaan

Berhasil atau tidaknya sebuah pekerjaan sangat bergantung pada peran pengendalian dan pengawasan. Pekerjaan yang sedang dilakukan pasti akan mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rencana yang telah ditetapkan, disinilah peran manajemen mutu dalam suatu pekerjaan. Manajemen mutu

adalah suatu pendekatan atau proses yang bertujuan Untuk memperbaiki kualitas produk atau layanan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses produksi atau layanan yang diberikan. Perubahan dalam manajemen mutu dapat dilakukan dengan cara memperbaiki proses ke yang lebih baik lagi. Manajemen mutu dalam Aktualisasi aksi perubahan ini adalah menerapkan PDCA (Plan, Do, Check, Action) yaitu :

- Plan : Adalah suatu tahapan perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah dan di dalam tahapan ini masalah dapat terselesaikan serta tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud. Sesuai dengan aksi perubahan yang dilakukan, maka perencanaan dalam tahapan ini adalah melaksanakan pelatihan dan peningkatan keterampilan pegawai termasuk dalam tim spesialisasi edukasi.
- Do : Pada tahapan ini melakukan kontrol kualitas kepada setiap individu yang terlibat dalam aksi perubahan yang dilakukan
- Check : Melakukan pemeriksaan dan review dari hasil kegiatan pelatihan keterampilan yang sudah dilakukan
- Action : Pada tahapan ini, seluruh tahapan yang sudah diperbaiki harus berdasarkan evaluasi dari tahapan **Do** dan **Check** yang didalamnya terdapat upaya dalam mengidentifikasi masalah selama penerapan kegiatan pelatihan keterampilan.



Gambar 1.3 Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) pada Manajemen Mutu

Tabel 1.6 Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi(Klasikal/Non Klasikal)
Pejabat Struktural (Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid)	- Kepemimpinan perubahan - Perencanaan strategis - Pengambilan keputusan berbasis data	- Diklat Kepemimpinan (Klasikal)- - Coaching & mentoring (Non Klasikal)
Pejabat Perencana/Program	- Penyusunan perencanaan berbasis kinerja - Penyusunan RKA sesuai SIPD - Analisis kebutuhan program & anggaran	- Bimbingan teknis perencanaan & penganggaran (Klasikal)- - Workshop dan FGD lintas OPD (Non Klasikal)
Pejabat Keuangan & Administrasi	- Pemahaman regulasi keuangan daerah - Akuntabilitas pengelolaan anggaran - Penguasaan aplikasi SIPD	- Pelatihan pengelolaan keuangan daerah (Klasikal)- - Pendampingan penggunaan SIPD (Non Klasikal)
Staf Teknis (Operator Input RKA/SIPD)	- Keterampilan teknologi informasi - Ketelitian dalam input data - Pemahaman indikator kinerja	- Pelatihan penggunaan aplikasi SIPD (Klasikal)- - On the job training (Non Klasikal)
Tim Monitoring & Evaluasi (Monev)	- Kemampuan analisis data - Penyusunan laporan evaluasi - Penilaian indikator kinerja	- Workshop Monev berbasis kinerja (Klasikal)- - Sharing session antar dinas (Non Klasikal)

Masyarakat/Pemangku Kepentingan Eksternal	- Partisipasi dalam penyusunan rencana - Pemahaman terhadap program & manfaat layanan publik	- Sosialisasi & forum konsultasi publik (Klasikal)- Media informasi & komunikasi online (Non Klasikal)
--	--	--

BAB II

DEKSRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. MEMBANGUN INTEGRITAS KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/ atau etika organisasi dan jujur dalam berhubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Sub Komponen Integritas :

1. Tanggung jawab
2. Komitmen
3. Kedisiplinan
4. Kejujuran
5. Konsisten
6. Pengambilan Keputusan

Sedangkan berdasarkan KBBI, Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sikap integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan antara kesatuan pola pikir, perasaan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Dalam konteks aksi perubahan, nilai nilai integritas dibangun secara konkret oleh *action leader* bersama tim efektif dengan menanamkan nilai kepercayaan (*Trust*) dalam berbagai situasi—baik formal maupun informal. Setiap sub-komponen integritas memiliki peran penting dalam memperkuat kepemimpinan dan dinamika kerja tim.

- Tanggung jawab tercermin dari keberanian *action leader* dan tim dalam mengambil peran serta menyelesaikan tugas hingga tuntas, tanpa menghindar dari konsekuensi.

- Komitmen ditunjukkan melalui kesungguhan bersama dalam menjalankan visi perubahan secara konsisten, meskipun menghadapi tantangan.
- Kedisiplinan dibangun melalui keteraturan dalam bekerja sesuai waktu, prosedur, dan aturan yang telah disepakati dalam tim.
- Kejujuran menjadi landasan penting dalam komunikasi dua arah antara *action leader* dan tim, yang memungkinkan adanya keterbukaan dalam menyampaikan fakta dan informasi.
- Konsistensi dijaga agar perilaku pemimpin dan anggota tim tidak berubah-ubah dalam menerapkan nilai-nilai organisasi, baik saat diawasi maupun tidak.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berdasarkan data serta pertimbangan etis, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau sesaat.

Melalui kepemimpinan yang berintegritas, *action leader* memberikan contoh nyata yang menginspirasi anggota tim untuk bertindak sesuai standar etika, menunjukkan kinerja yang responsif, bertanggung jawab, serta selalu berorientasi pada hasil yang optimal. Dengan demikian, kolaborasi antara pemimpin dan tim bukan hanya menciptakan hasil kerja yang berkualitas, tetapi juga membentuk budaya kerja yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini didasarkan pada komponen diatas, Action Leader sangat mengapresiasi sikap dan perilaku Tim Efektif yang disiplin dan berkomitmen penuh dalam berkontribusi untuk penyelesaian aksi perubahan. Tim Efektif menjalankan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Nomor : 05/KPTS/DPKP/2025 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan "Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang."



Gambar 2.1 Dokumentasi Penyusunan Tim Efektif Aksi Perubahan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (PEMANFAATAN IT)

Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). IT memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis data. Dengan adanya sistem digital, yang menghubungkan penyusunan RKA dapat langsung terhubung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra, RKPD, maupun data kebutuhan riil operasional OPD. Hal ini membantu mencegah ketidaksesuaian antara program dan kebijakan, serta meminimalkan duplikasi atau kegiatan yang tidak relevan.

Selain itu, pemanfaatan IT mendukung akurasi penghitungan anggaran, mempercepat proses validasi internal, serta memudahkan pelacakan dan evaluasi terhadap usulan kegiatan. Kegiatan reviu dan koreksi yang sebelumnya manual dan memakan waktu kini dapat dilakukan secara kolaboratif melalui platform digital, sehingga proses penyusunan menjadi lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. TI juga memperkuat akuntabilitas dan

transparansi karena seluruh proses dan data dapat diaudit serta diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

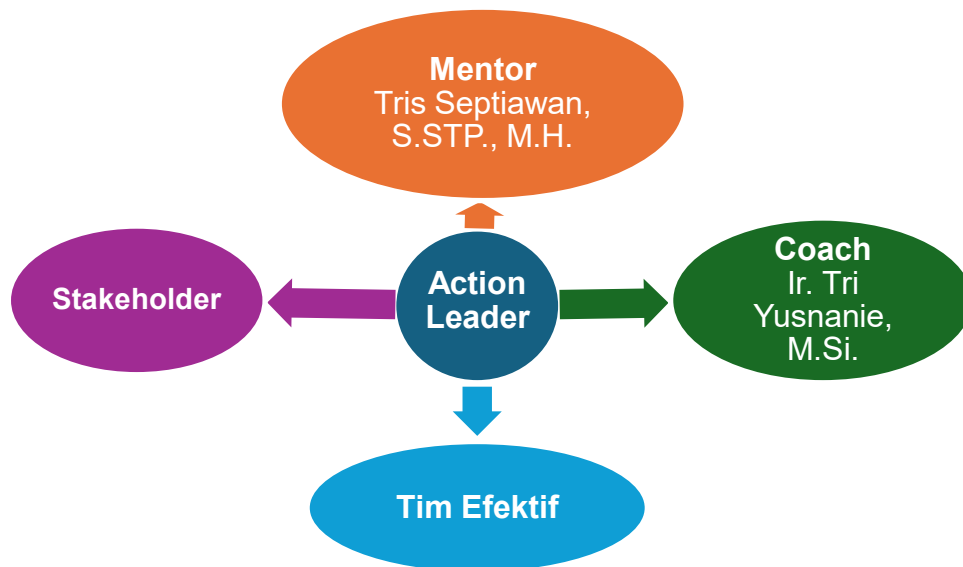
Dengan kata lain, pemanfaatan IT bukan hanya mempercepat dan menyederhanakan proses teknis penyusunan RKA, tetapi juga memperkuat landasan substansial perencanaan yang berbasis data, kinerja, dan kebutuhan nyata. Ini menjadi langkah penting dalam menghasilkan RKA yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

C. PENGELOLAAN TIM

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), diperlukan tidak hanya perbaikan sistem dan metode, tetapi juga pembentukan tim yang efektif sebagai motor penggerak perubahan. Tim yang efektif adalah sekelompok individu dengan peran dan kompetensi yang saling melengkapi, mampu bekerja secara kolaboratif, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks reformasi penyusunan RKA, tim ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis kebutuhan, hingga penyusunan dan evaluasi anggaran dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Keberadaan tim efektif menjadi krusial karena mereka akan menjadi penghubung antara visi kelembagaan, penggunaan teknologi informasi, serta koordinasi lintas unit kerja, yang semuanya merupakan elemen penting dalam menciptakan dokumen RKA yang lebih responsif dan berkualitas.

Tim efektif ini beranggotakan inti beberapa orang yaitu mulai dari Mentor yaitu Bapak Tris Septiawan, S.STP., M.H yang juga merupakan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, kemudian penulis sendiri yaitu Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si selaku *Action Leader*. Ibu Ir. Tri Yusnane, M.Si selaku coach yang ikut membimbing agar aksi perubahan ini dapat berjalan dengan baik, juga segenap Anggota Tim Efektif yang juga ikut memberikan kontribusi dalam upaya pengoptimalan penyusunan RKA yang menjadi topik utama dalam laporan aksi perubahan ini.

Bagan 2.1 Pembentukan Tim Efektif



Tabel 2.1 Peran dan Tugas masing - masing anggota Tim

No	Nama	Peran dalam Tim	Tugas
I	Penanggung Jawab		
1.	Tris Septiawan, S.STP., M.H	Mentor	Memberikan persetujuan, bimbingan, arahan dan dukungan terhadap aksi perubahan
II.	Koordinator		
2.	Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si	Leader	Bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses pelaksanaan Aksi Perubahan
III.	Seksi Administrasi dan Dokumentasi		
3.	Intan Cahya Muda	Ketua	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan,
4.	Dian Utari Putri	Anggota	melaksanakan tertib administrasi setiap kegiatan, mengelola dokumentasi dan berkontribusi dalam penyusunan laporan aksi perubahan
5.	Teddy Cahya Wibram	Anggota	
6.	Vheira Juventini	Anggota	
7.	Indah Putri Widyah Dana	Anggota	
8.	Marchella Liu Josri	Anggota	
9.	Abd Mugits Hasbullah	Anggota	
IV.	Seksi Pendampingan		
10.	Rico Burhensyah	Ketua	Membantu mengumpulkan data dari setiap bagian, dan memastikan semua informasi yang dibutuhkan sudah lengkap
11.	Firmansyah	Anggota	
12.	Hendra Bitra Setiawan, SH., M.Si	Anggota	
13.	Muhammad Abduh, A.Md	Anggota	
14.	Satria Gilang Maulana A.Md.T	Anggota	
V.	Seksi Evaluasi dan Pemantauan		
15.	Denny, S.T	Ketua	Memantau dan menilai setiap tahap dalam proses penyusunan RKA agar sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku, memastikan kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan, memberi masukan untuk perbaikan, dan mengevaluasi hasil kerja tim
16.	Imron Edwar, S.Ip	Anggota	
17.	Mohammad Hardiansyah, S.E., M.Si	Anggota	
18.	Zulkarnain Jamil, S.T	Anggota	

Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi dan latar belakang masing - masing anggota tim. Untuk penguatan komunikasi internal, *Action Leader* secara rutin melakukan rapat koordinasi yang menjadi wadah untuk penyampaian progress, hambatan dan solusi agar upaya untuk mengoptimalkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dapat terlaksana secara efektif. Dalam rapat

tersebut, penyampaian informasi teknis dilakukan secara cepat dan terbuka guna menjangkau saran serta masukan dari setiap anggota tim. Selain itu, Leader juga secara aktif berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang (Mentor) terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang (Mentor) berperan penting dalam membimbing, memberi arahan, serta menjadi fasilitator dalam penyelesaian berbagai permasalahan tim



Gambar 2.2 Foto Rapat Persiapan Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penyusunan RKA pada DPKP

Tim yang efektif bukan hanya sekadar bekerja bersama, tetapi juga tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan. Dengan pengelolaan yang baik, penyusunan RKA dapat berjalan lebih terarah dan efisien, mulai dari proses awal hingga tahap akhir penginputan. Efisiensi ini turut mendorong pemanfaatan waktu yang lebih optimal, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap bidang atau sektor lain yang mungkin masih memerlukan perhatian tambahan

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp: 0711-312011, 113, Fax: 0711-360988 Kode Pos 30131	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG Nomor : D5 / KPTS / DPKP / 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN "STRATEGI PENINGKATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG" KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG	
Menimbang	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan sebagai salah satu tahapan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Efektif untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan tersebut; b. bahwa nama yang ditunjuk sebagaimana dalam Surat Keputusan ini di pandang cukup untuk ditunjuk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Efektif Aksi Perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a ada b ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN PERTAMA : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025 atas nama: Nama : Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si NIP : 199706052018081002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Judul Aksi : Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang KEDUA : Menunjuk/ menetapkan nama-nama pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Keanggotaan Tim Efektif. KETIGA : Tim Efektif bertugas untuk: 1. Penanggung Jawab sekaligus Mentor memberikan persetujuan, bimbingan, arahan dan dukungan terhadap aksi perubahan; 2. Action Leader/Koordinator bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan, proses pelaksanaan Aksi Perubahan; 3. Seksi Administrasi dan Dokumentasi bertugas membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, melaksanakan terbit administrasi setiap kegiatan, mengelola dokumentasi dan berkontribusi dalam penyusunan laporan aksi perubahan; 4. Seksi Pendampingan bertugas membantu mengumpulkan data dari setiap bagian, dan memastikan semua informasi yang dibutuhkan sudah lengkap; 5. Seksi Evaluasi dan Pemantauan bertugas memantau dan menilai setiap tahap dalam proses penyusunan RKA agar sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku, memastikan kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan, memberi masukan untuk perbaikan, dan mengevaluasi hasil kerja tim;	
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 25 Oktober 2025 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang  Pembina Tingkat I / IV/b NIP. 197911120100101014	

Gambar 2.3 Foto SK Tim EFektif

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. CAPAIAN DAN PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN

Setelah memperoleh persetujuan dari tim penguji terhadap Rancangan Aksi Perubahan pada tanggal 23 Oktober 2025, peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) melanjutkan ke tahap implementasi aksi perubahan di unit kerjanya, yaitu di Dinas Pemadam Kebakaran. Aksi perubahan ini menjadi bentuk nyata dari upaya peningkatan strategi dalam proses penyusunan RKA yang berlangsung di lingkungan kerja peserta PKP.

Untuk aksi perubahan yang berjudul **"Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang"** di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) telah melakukan persiapan untuk menjalankan kegiatan aksi perubahan yang sudah dijadwalkan sebelumnya selama 1 bulan setelah Rancangan Aksi Perubahan dipresentasikan, disepakati dan disetujui.



Gambar 3.1 Foto Konsultasi dengan Mentor terkait Implementasi Aksi Perubahan

Sebagai permulaan, peserta PKP menghadap mentor pada hari Selasa, 25 September 2025. Pada kegiatan mentoring tersebut peserta menindaklanjuti

hasil dari seminar Rancangan Aksi Perubahan untuk meninjau langkah teknis yang diperlukan untuk implementasi aksi perubahan sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Untuk memastikan aksi perubahan dapat terlaksana secara optimal, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) menyadari bahwa dalam penyusunan proses laporan aksi perubahan diperlukan penguatan koordinasi dengan para *stakeholder* baik lingkup internal maupun eksternal di tengah kesibukan masing-masing untuk memenuhi pelaksanaan tugasnya.

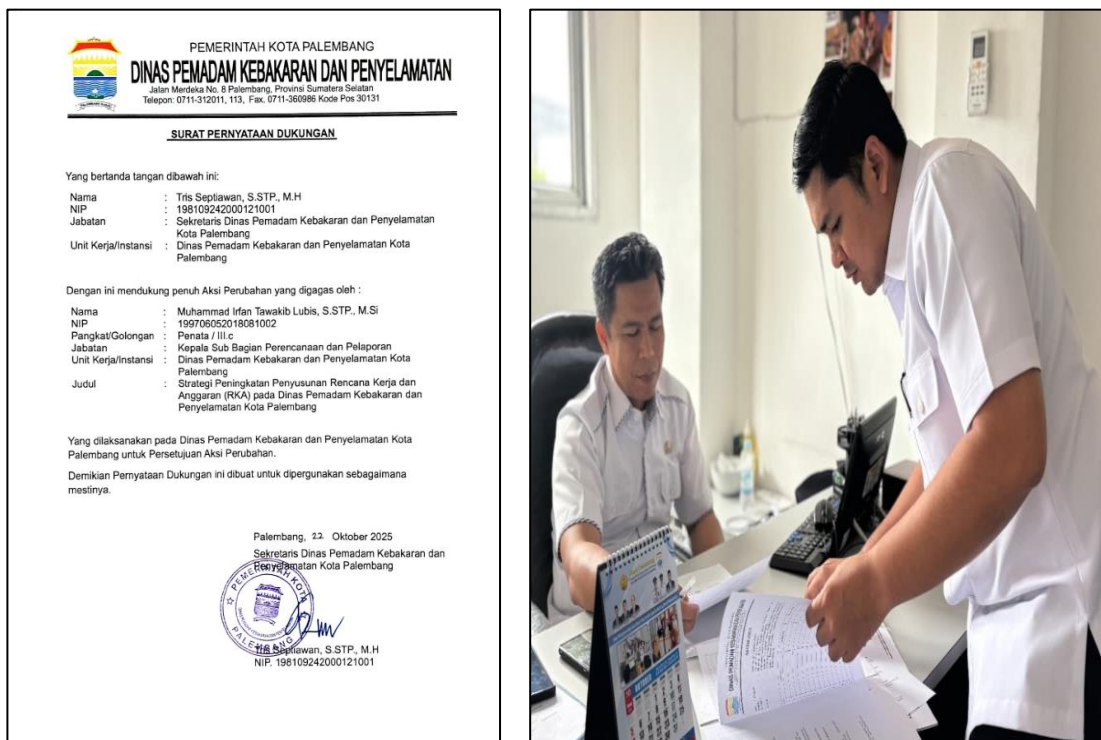
Berikut uraian pelaksanaan implementasi aksi perubahan **"Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang"** di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang:

a) Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Pendek

Setelah Seminar Rancangan Aksi Perubahan mendapatkan persetujuan dari mentor, coach dan penguji untuk dilanjutkan, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah mengimplementasikan aksi perubahan. Pada jangka pendek, aksi perubahan ini dilakukan dari 24 September 2025 sampai dengan 05 Desember 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1. Konsultasi dengan mentor mengenai rencana kegiatan aksi perubahan dan meminta dukungan mentor

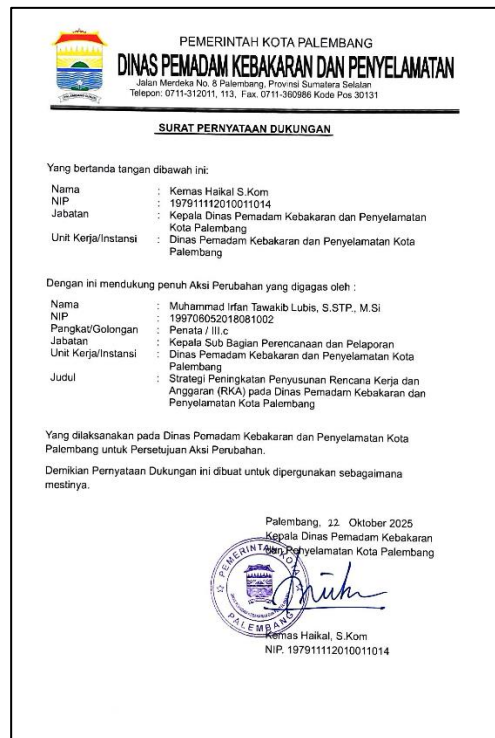
Konsultasi dengan mentor mengenai rencana kegiatan aksi perubahan dengan judul "Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang" dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 bertempat di ruang Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang dengan hasil mendapatkan dukungan penuh dari Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang



Gambar 3.2 Dokumentasi Foto/Video dan Surat Dukungan

2. Mengajukan proposal mengenai kegiatan aksi perubahan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang

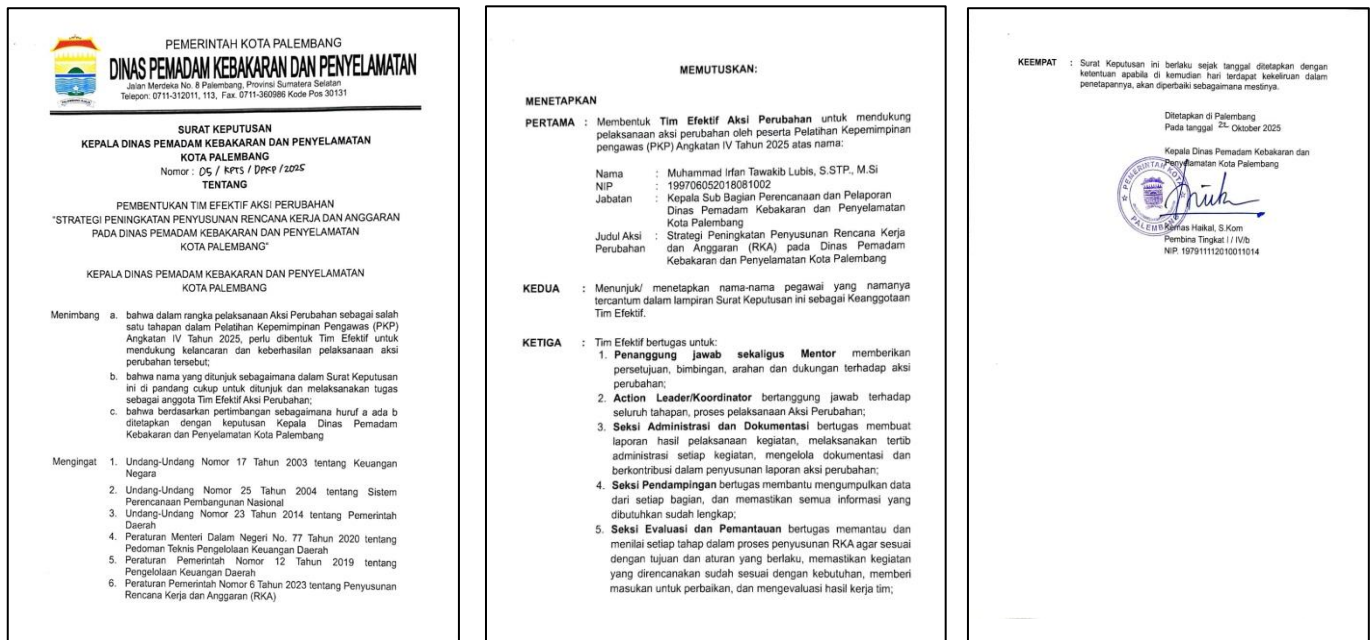
Setelah pemaparan mengenai rancangan kegiatan aksi perubahan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang pada tanggal 16 Oktober 2025 di ruangan kepala dinas didapatkan hasil berupa dukungan penuh dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang untuk melakukan implementasi dari strategi peningkatan penyusunan RKA agar menjadi jauh lebih efisien.



Gambar 3.3 Dokumentasi Foto/Video dan Surat Dukungan

3. Membentuk Tim Efektif

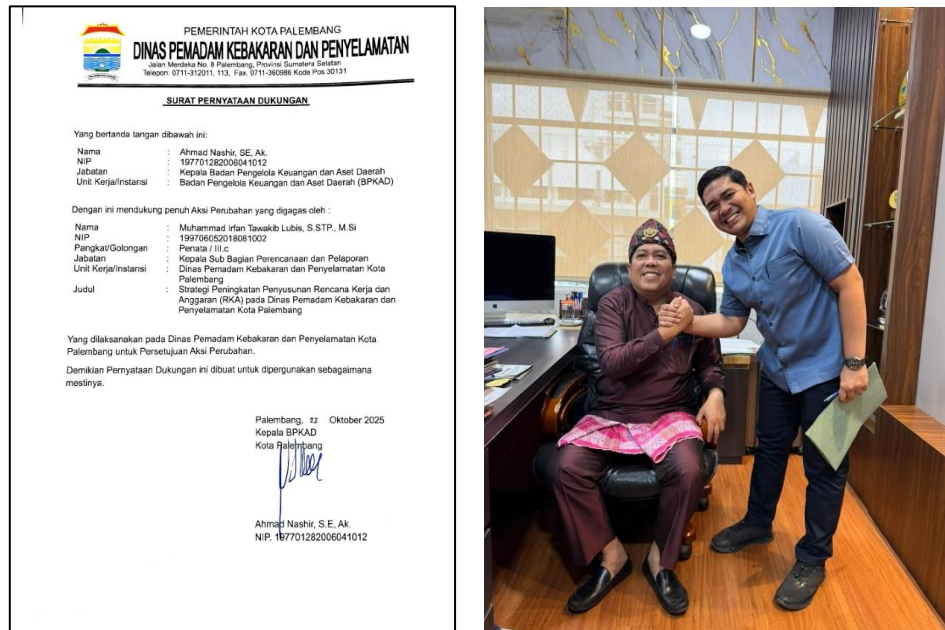
Kegiatan mulai dilaksanakan pada Minggu Pertama bulan Oktober 2025 untuk menetapkan Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan. Output yang dihasilkan adalah SK Tim Efektif yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.



Gambar 3.4 SK Tim Efektif Aksi Perubahan

4. Melakukan koordinasi dengan Kepala BPKAD

Setelah diterimanya dukungan penuh dari Coach, Mentor (Sekretaris Dinas) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang beserta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, maka usulan ini kemudian disampaikan untuk dilakukan koordinasi dengan Kepala BPKAD selaku instansi yang membawahi untuk kegiatan penganggaran terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan pada tanggal 22 Oktober 2025 maka diterima hasil berupa dukungan penuh dari Kepala BPKAD untuk sepenuhnya melanjutkan kegiatan aksi perubahan yang sudah diusulkan.



Gambar 3.5 Dokumentasi Foto/Video dan Surat Dukungan

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

1. Manfaat bagi Organisasi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang)

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan RKA, sehingga anggaran yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional dan prioritas pelayanan.
- Meminimalkan kesalahan dalam penginputan data dan dokumen RKA melalui penerapan mekanisme yang lebih sistematis dan terstandar.
- Mendorong sinkronisasi program dan kegiatan antar subbagian/unit di lingkungan Dinas, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- Mempercepat proses penyusunan dan penyampaian RKA kepada BPKAD, yang berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan anggaran.

2. Manfaat bagi Pegawai / Internal OPD

- Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menyusun RKA sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan SIPD).
- Mengurangi beban kerja yang bersifat administratif akibat revisi berulang akibat kesalahan teknis atau ketidaksesuaian dokumen.
- Mendorong budaya kerja yang lebih kolaboratif dan berbasis perencanaan kinerja.

3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

- Mendukung penyusunan APBD Kota Palembang yang lebih berkualitas karena RKA dari perangkat daerah tersusun secara optimal dan akuntabel.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

4. Manfaat bagi Masyarakat

- Secara tidak langsung, optimalisasi RKA akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- Masyarakat akan memperoleh layanan yang lebih tepat sasaran karena anggaran dialokasikan secara lebih rasional dan berdasarkan kebutuhan riil lapangan.

C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Kompetensi kepemimpinan merupakan fondasi penting dalam mendorong kinerja unggul di setiap organisasi. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, organisasi tidak hanya mampu mengidentifikasi potensi kepemimpinan, tetapi juga membentuk karakter pemimpin yang adaptif, visioner, dan mampu mengelola perubahan secara efektif.

Dalam konteks pelatihan kepemimpinan, implementasi aksi perubahan menjadi wadah nyata untuk menguji dan menerapkan kompetensi yang telah diperoleh selama proses diklat. Setiap peserta didorong untuk merancang sebuah proyek perubahan yang relevan dengan kebutuhan unit kerjanya, lalu mengeksekusinya dengan pendekatan kepemimpinan yang strategis dan kolaboratif.

Selama pelaksanaan aksi perubahan, peserta dituntut untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang visi yang jelas, menggerakkan tim, mengelola resistensi, serta mengambil keputusan berbasis data dan evaluasi. Situasi ini menjadi simulasi langsung dari dinamika kepemimpinan yang sesungguhnya, di mana pemimpin tidak hanya mengandalkan instruksi, tetapi juga inspirasi dan keteladanan.

Tak hanya itu, proses ini juga memperkuat kompetensi komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan yang efektif. Dalam banyak kasus, keberhasilan aksi perubahan sangat ditentukan oleh kemampuan peserta dalam membangun komitmen dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan di lingkungannya.

Dengan demikian, implementasi aksi perubahan bukan sekadar tugas akhir dari program pelatihan, melainkan fase krusial dalam transformasi peserta menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Kompetensi kepemimpinan yang dikembangkan melalui pengalaman langsung ini diharapkan menjadi bekal berharga dalam mendorong inovasi dan membawa perubahan positif secara berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing.

Yang Terdampak Aksi Perubahan	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan
Tim Efektif	Mampu bekerja sama secara efektif	Koordinasi Persuasif
Sub Bagian Perencanaan	Dapat meringankan penginputan kebutuhan di setiap bidang untuk penyusunan RKA	Koordinasi
Sub Bagian (Keuangan dan Umpeg)	Meningkatkan kompetensi SDM agar dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai pada masing – masing sub bagian	Sosialisasi dan Konsultasi
Bidang (Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana, Pencegahan)	Meningkatkan kompetensi SDM agar dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai pada masing – masing sub bidang	Sosialisasi dan Konsultasi

Tabel 3.1 Rencana Pengembangan Kompetensi Diri

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merujuk pada kemampuan dan upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan inovasi atau program perubahan yang telah dilakukan. Keberlanjutan aksi perubahan menjadi penting karena banyak perubahan yang memerlukan waktu dan konsistensi untuk mencapai dampak yang signifikan.

Keberlanjutan aksi perubahan membutuhkan perhatian yang berkelanjutan, kerja sama yang erat antara pihak-pihak terlibat dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, upaya untuk mencapai tujuan perubahan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Beberapa aspek yang relevan untuk mencapai keberlanjutan aksi perubahan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen penuh dari semua pihak terlibat
2. Ketersediaan penganggaran kegiatan
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia
4. Integrasi kegiatan aksi perubahan dengan RPJMD, Renstra serta peta Jalan kelitbangan.
5. Melibatkan masyarakat secara aktif
6. Pemantauan dan evaluasi secara teratur diperlukan untuk mengukur kemajuan dan dampak dari aksi perubahan.
7. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan
8. Keterbukaan terhadap inovasi dan fleksibilitas dalam mengatasi masalah akan membantu mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program.

Sebagai tindak lanjut strategi peningkatan efisiensi dalam penyusunan RKA, akan dilaksanakan pelatihan bagi setiap bidang agar dapat melakukan penginputan kebutuhan masing-masing secara mandiri ke dalam sistem. Langkah ini diambil untuk menghindari penumpukan pekerjaan di satu bidang saja, khususnya bidang perencanaan dan pelaporan, serta untuk memastikan bahwa setiap usulan program benar-benar mencerminkan kebutuhan riil unit

kerja terkait. Dengan mekanisme ini, bidang perencanaan dan pelaporan dapat lebih fokus pada proses verifikasi, pemantauan, dan sinkronisasi usulan antar bidang, sehingga penyusunan RKA menjadi lebih efektif, akurat, dan terintegrasi.

Untuk memastikan keberlanjutan dari aksi perubahan telah dirumuskan tahapan jangka menengah dan tahapan jangka panjang, sebagai berikut:

1. Target Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan RKA agar lebih berbasis data dan kebutuhan riil, sehingga program yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Upaya ini juga diiringi dengan penyempurnaan sistem dan prosedur penyusunan RKA yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui integrasi hasil evaluasi perencanaan sebelumnya. Selain itu, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD terus didorong, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan internal yang mendukung proses perencanaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

2. Tujuan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, aksi perubahan ini diarahkan untuk menciptakan sistem penyusunan RKA yang terintegrasi dengan perencanaan strategis daerah serta kebutuhan riil operasional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang. Sistem ini diharapkan mampu menghasilkan RKA yang berkualitas, akuntabel, tepat sasaran, serta selaras dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui pendekatan ini, optimalisasi anggaran dapat secara langsung mendukung pencapaian kinerja OPD, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang lebih cepat, tepat, dan efektif bagi masyarakat Kota Palembang.

Keberlanjutan aksi perubahan didukung dengan kesepakatan bersama antara mentor dan action leader tertuang dalam komitmen tindak lanjut aksi perubahan Nomor : 800/591/DPKP/2025 tanggal 22 Oktober 2025

Sebagai berikut :

	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon: 0711-312011, 113, Fax. 0711-360986 Kode Pos 30131
KOMITMEN TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN NOMOR : 800 / 591 / DPKP / 2025	
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Kemas Haikal, S.Kom. Nip : 197911112010011014 Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Instansi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang	
Selaku atasan langsung dari pegawai : Nama : Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si. NIP : 199706052018081002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Instansi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang	
Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk menindaklanjuti Aksi Perubahan yang disusun oleh Peserta PKP Angkatan IV tersebut diatas sesuai dengan Tujuan Jangka Menengah dan Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai. Demikian pernyataan komitmen ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang  KEMAS HAIKAL, S.KOM Pembina Tingkat I/IV/b NIP. 197911112010011014	Palembang, 22 Oktober 2025 Peserta Diklat  M. IRFAN TAWAKIB L, S. STP., M.SI Penata /III/c NIP. 199706052018081002

Gambar 4.1 Surat Komitmen Tindak Lanjut Aksi Perubahan

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Dalam rangka mengimplementasikan aksi perubahan berjudul "Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang" *Action Leader* dapat memilih mata pelatihan pilihan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Mata Pelatihan yang dipilih oleh Action Leader

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palembang	Manajemen Pemerintahan	Mandiri	Mata pelatihan ini berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui penerapan prinsip manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, penyusunan RKA di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan menjadi lebih terarah, transparan, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi.	Modul
2		Perencanaan Pembangunan	Mandiri	Mata pelatihan ini penting untuk memperkuat	Mengikuti Kelas Pelatihan ASN Berpijar, Modul

		Nasional (BAPPENAS)		pemahaman aparatur tentang keterkaitan perencanaan program dan penganggaran berbasis hasil, sehingga penyusunan RKA menjadi strategis, selaras dengan visi-misi dan kebijakan pembangunan, serta mendukung peningkatan layanan publik, termasuk di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.	
3		Design Thinking dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (ASN BERPIJAR)	Mandiri	Mata pelatihan ini mendorong aparatur menggunakan pendekatan design thinking untuk berpikir kreatif, analitis, dan kolaboratif, sehingga RKA dapat disusun lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Mengikuti Kelas Pelatihan ASN Berpijar, Modul

1. Manajemen Pemerintahan

Pembelajaran manajemen pemerintahan yang terkait dengan aksi perubahan berkaitan dengan proses memahami dan menerapkan prinsip - prinsip manajerial dalam konteks pemerintahan, terkhususnya saat melakukan transformasi atau perbaikan pada sistem, kebijakan dan layanan publik.

Aspek-aspek relevan yang dapat dipelajari dalam pembelajaran ini antara lain:

a) Pengembangan Kebijakan

Mempelajari cara merancang kebijakan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan di lingkungan pemerintahan.

b) Manajemen Perubahan

Mempelajari teknik mengelola perubahan dalam organisasi pemerintahan, termasuk menghadapi resistensi dan membangun dukungan dari berbagai pihak.

c) Kepemimpinan

Mempelajari bagaimana menjadi pemimpin yang mampu mendorong dan mengarahkan aksi perubahan secara efektif.

d) Evaluasi dan Pemantauan

Mempelajari cara melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan aksi perubahan untuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan.

e) Kolaborasi dan Kemitraan

Mempelajari strategi membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan aksi perubahan.

2. Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Mata pelatihan **Perencanaan dan Pembangunan Nasional** bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelatihan ini menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

program agar selaras dengan prioritas pembangunan. Materi yang diberikan mencakup pemahaman kerangka perencanaan pembangunan mulai dari RPJPN, RPJMD, hingga rencana kerja tahunan instansi pemerintah; teknik perumusan kebijakan dan strategi pembangunan berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat; penyusunan anggaran berbasis kinerja yang efisien, efektif, dan akuntabel; serta monitoring dan evaluasi implementasi program untuk memastikan pencapaian tujuan. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

Aspek-aspek relevan yang dapat dipelajari dalam pembelajaran ini antara lain:

a) Keselarasan Perencanaan dan Prioritas Pembangunan

Pemahaman kerangka perencanaan nasional dan daerah membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RKA yang sesuai dengan prioritas pembangunan kota dan nasional, sehingga program dan kegiatan menjadi relevan dan terukur.

b) Penganggaran Efektif dan Berbasis Kinerja

Materi penganggaran berbasis kinerja memungkinkan dinas menyusun RKA dengan fokus pada hasil, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan penggunaan sumber daya secara optimal.

c) Penyusunan Strategi Program yang Tepat

Dengan pelatihan ini, aparatur mampu merumuskan strategi program dan kegiatan yang efektif, misalnya peningkatan kapasitas pemadam kebakaran, penyediaan sarana-prasarana, dan peningkatan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran.

d) Monitoring dan Evaluasi yang Sistematis

Pemahaman tentang evaluasi dan akuntabilitas memungkinkan dinas memantau pelaksanaan RKA secara berkala, sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan dan dilakukan perbaikan jika diperlukan.

e) Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Pengetahuan tentang koordinasi dan kemitraan mendukung dinas dalam membangun sinergi dengan instansi terkait, masyarakat, dan sektor swasta, sehingga pelaksanaan RKA dapat lebih efektif dan berdampak luas.



Gambar 5.1 Sertifikat Siap Hadapi Tantangan Dinamis

3. Design Thinking dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (ASN BERPIJAR)

Mata pelatihan **Design Thinking dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan** bertujuan membekali aparaturnya pemerintah dengan pendekatan berpikir kreatif dan sistematis untuk menghadapi masalah kompleks dan mengambil keputusan yang efektif. Pelatihan ini menekankan pendekatan *user-centered*, yaitu fokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan inovatif. Peserta dibekali kemampuan memahami perspektif pengguna (*Empathize*), merumuskan masalah secara jelas (*Define*), menghasilkan ide kreatif (*Ideate*), membuat prototipe solusi (*Prototype*), serta menguji dan mengevaluasi efektivitas solusi (*Test*). Dengan demikian, aparaturnya dapat mengatasi masalah secara terstruktur, meminimalkan risiko kegagalan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam kebijakan dan program pelayanan publik.

Aspek-aspek relevan yang dapat dipelajari dalam pembelajaran ini antara lain:

a) **Pemecahan Masalah yang Lebih Tepat Sasaran**

Dengan Design Thinking, penyusunan RKA dapat dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan riil masyarakat dan kondisi operasional dinas, sehingga program dan kegiatan yang dirancang relevan dengan tantangan yang dihadapi di lapangan.

b) **Inovasi dalam Perencanaan Program**

Pelatihan ini mendorong aparaturnya menghasilkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan efektivitas layanan, misalnya inovasi dalam peningkatan waktu tanggap, pengadaan sarana-prasarana, atau sistem penanganan kebakaran.

c) **Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan**

Dengan tahap uji coba dan evaluasi prototipe, dinas dapat menilai efektivitas program sebelum diimplementasikan, sehingga alokasi anggaran dalam RKA lebih efisien dan berdampak nyata.

d) **Pendekatan Berbasis Pengguna (*User-Centered*)**

Fokus pada kebutuhan masyarakat memastikan RKA yang disusun tidak hanya formalitas administratif, tetapi benar-benar meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas pelayanan pemadam kebakaran serta penyelamatan.

e) **Kolaborasi dan Iterasi**

Design Thinking mendorong kerja sama lintas tim dan pemangku kepentingan, sehingga proses penyusunan RKA menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan atau situasi darurat



Gambar 5.2 Sertifikat Inovasi

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi adalah penyebarluasan ide, gagasan, atau informasi kepada khalayak luas. Tujuannya adalah agar informasi tersebut dipahami, diterima, dan bahkan dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok target tertentu. Dalam konteks akademik, diseminasi adalah proses penting untuk membagikan hasil penelitian melalui berbagai cara seperti publikasi ilmiah, seminar, atau konferensi, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan adalah proses penyebaran informasi mengenai hasil atau rencana perubahan yang telah dilakukan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemanfaatan lebih luas.

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

1. Secara Online

Penerapan strategi komunikasi secara online dilaksanakan melalui penguatan koordinasi penyusunan RKA dengan memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana komunikasi terpadu. Koordinasi internal dilakukan melalui pembentukan grup WhatsApp yang berfungsi untuk mempercepat penyampaian informasi penting, undangan rapat, instruksi teknis, serta pengumpulan data dan dokumen pendukung dari setiap bidang secara *real time*, sehingga proses perencanaan dapat berlangsung lebih efisien, responsif, dan terarah. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan anggaran, sehingga proses penyusunan RKA dapat dievaluasi oleh publik maupun pemangku kepentingan secara terbuka dan berkelanjutan.

2. Secara Offline

Penerapan strategi komunikasi secara offline dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi dan rapat tatap muka secara berkala antara pimpinan, pejabat struktural, dan perwakilan setiap bidang untuk

membahas penyusunan RKA secara langsung dan mendetail. Pertemuan ini mencakup pembahasan kebutuhan masing-masing bidang secara rinci. Selain itu, komunikasi offline juga diwujudkan melalui penyampaian surat resmi, disposisi internal, dan penyediaan dokumen fisik sebagai bahan pendukung proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi SDM, dilakukan bimbingan teknis (bimtek) terkait penginputan RKA melalui aplikasi SIPD, untuk mendukung penyusunan RKA yang akurat dan berbasis kebutuhan. Melalui pendekatan ini, komunikasi dapat berlangsung lebih mendalam, memperkuat kerja sama antar unit, dan membangun kesamaan persepsi sehingga proses penyusunan RKA dapat terlaksana secara komprehensif dan tepat sasaran.

B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/ REPLIKASI AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan penyusunan RKA pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang telah mendapatkan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak. Penerapan koordinasi online melalui grup WhatsApp dan sosialisasi bimtek penginputan RKA melalui aplikasi SIPD telah diadopsi oleh beberapa bidang lain di Dinas maupun oleh unit kerja teknis di lingkungan pemerintah kota.

Selain itu, media sosial resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang yang digunakan untuk mempublikasikan alur penyusunan RKA dan kegiatan strategis juga mendapat apresiasi dan diadopsi sebagai praktik baik oleh unit lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dukungan dari pimpinan, pejabat struktural, dan pemangku kepentingan terlihat dari partisipasi aktif dalam rapat koordinasi, forum konsultasi, dan penerapan rekomendasi yang dihasilkan dari aksi perubahan.

Dengan demikian, inovasi komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga menjadi contoh praktik baik yang dapat di replikasi di bidang lain, mendukung tercapainya tata

kelola perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB VII

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Pengembangan potensi diri merupakan bagian penting dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan yang efektif, terkhusus bagi para peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan proses pemetaan yang sistematis terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap individu. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, guna mendukung pengembangan kompetensi yang relevan terhadap pekerjaan dan pengembangan karier jangka panjang. Proses ini mengacu pada Permenpan No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam pemetaan ini terdapat tiga komponen utama yang dianggap sebagai kompetensi inti yaitu : Integritas, Kemampuan Bekerja sama dan Mengelola Perubahan.

Tahapan dalam proses pengembangan potensi diri meliputi :

1. Peserta melakukan penilaian mandiri terhadap sikap dan perilaku kepemimpinannya
2. Mentor atau atasan langsung memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta
3. Adanya komunikasi antara peserta dan mentor dalam mengevaluasi sikap dan perilaku tersebut
4. Penyusunan strategi pengembangan potensi diri sendiri

Proses identifikasi potensi diri dilakukan dengan menggunakan berupa kuesioner yang diisi oleh peserta dan mentor. Hasil dari pemetaan ini diterapkan untuk mengevaluasi *action leader* dalam pelaksanaan aksi perubahan

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama : Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si NIP : 199706052018081002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Instansi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palembang Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			Nama Mentor : Tris Septiawan, S.STP., M.H NIP : 198109242000121001 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang Instansi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang		
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8,5	8,35	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8,6	8,42	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8	8,4	8,28	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	8,00	8,30	8,21	Baik
	Pelayanan Publik	8	8,6	8,42	Baik
Mengelola Perubahan	Adaptabilitas	8	8,7	8,49	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8,8	8,56	Baik
	Rata-Rata	8,00	8,42	8,29	Baik
	Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :	8,33	8,57	8,50	Baik
Keterangan Kualifikasi 9.99-10 Istimewa 7-8.99 Baik 5-6.99 Cukup 3-4.99 Kurang 1-2.99 Sangat Kurang					

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si	Nama Mentor	: Tris Septiawan, S.STP., M.H
NIP	: 199706052018081002	NIP:	: 198109242000121001
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Jabatan	: Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Instansi	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palembang	Instansi	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	9,00	8,00	8,00	8,33	Baik
Mentor	9,00	8,30	8,42	8,57	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,00	8,21	8,29	8,50	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

8,50

Kualifikasi:

Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	

Gambar 7.1 Rekap Nilai Peserta

Hasil dari pemetaan dan potensi diri antara mentor dan peserta di akhir aksi perubahan diperoleh nilai akhir 9,06 dengan kualifikasi Baik berdasarkan tabel rekomendasi pengembangan potensi diri pada form rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta.

B. Proses dan Progres / Hasil

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Potensi Pengembangan Diri merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan yang telah dilakukan sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini disusun sebagai panduan bagi peserta dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinannya secara terarah dan berkelanjutan.

Tabel 7.1
Rencana Strategi Potensi Pengembangan Diri

No	Komponen / Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1	Kerjasama : Komunikasi	Aktif dalam mencari solusi terhadap masalah tim secara kolaboratif	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada atasan dan rekan	Minggu ke 2 Bulan September 2025	Minggu ke 4 Bulan September 2025	Koordinasi tim lebih efektif dan masalah dapat diselesaikan lebih cepat
2	Kerjasama : Komitmen dalam Tim	Meningkatkan kerja sama antar tim dengan cara mengadakan rapat secara rutin	Terbentuknya Tim Efektif	Minggu ke 2 Bulan September 2025	Minggu ke 1 Bulan Oktober 2025	Rapat berjalan dengan baik dan komitmen kerja tim meningkat
3	Mengelola Perubahan : Pengemban	Melakukan kegiatan	Koordinasi dengan	Minggu ke 4 Bulan	Minggu ke 3 Bulan	Pelaksanaan monitoring berjalan

	gan diri dan orang lain	Monitoring / Coaching Melakukan pembuatan SOP	atasan dan rekan kerja	September 2025	Oktober 2025	efektif dan menghasilkan peningkatan kinerja individu
4	Mengelola Perubahan : Orientasi pada Hasil	• Menerima Umpan balik atas hasil kerja • Melakukan Monitoring dan Evaluasi capaian kerja	Koordinasi dengan atasan dan rekan kerja	Minggu ke 2 Bulan Oktober 2025	Minggu ke 1 Bulan Desember 2025	Pencapaian kerja lebih terpantau dan terarah

BAB VIII

PENUTUP

A. SIMPULAN

Aksi perubahan dengan judul **“Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang”** telah diimplementasikan secara terencana dan bertahap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan OPD. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan RKA sebelumnya belum optimal akibat berbagai kendala, seperti kurangnya sinkronisasi antar unit kerja, perubahan kebijakan dan pagu indikatif, pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum maksimal, serta keterbatasan waktu dalam proses penyusunan.

Melalui penerapan berbagai strategi antara lain pembentukan Tim Efektif, penggunaan template RKA terstandar, penyelenggaraan pelatihan teknis, dan digitalisasi proses penyusunan perbaikan signifikan dapat dicapai. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki koordinasi lintas unit, meminimalkan kesalahan teknis, serta mempercepat proses penyusunan dokumen anggaran. Optimalisasi penggunaan SIPD juga mendorong terbangunnya sistem perencanaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Selain memberikan dampak positif bagi pegawai dan organisasi, aksi perubahan ini turut meningkatkan kualitas dokumen RKA yang menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berkontribusi langsung terhadap efektivitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan kesiapan operasional. Dengan demikian, aksi perubahan ini dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan jangka pendeknya serta memberikan landasan yang kuat untuk keberlanjutan perbaikan jangka menengah dan panjang.

B. SARAN

Untuk menjaga kesinambungan peningkatan kualitas penyusunan RKA pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, beberapa saran strategis yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan SOP dan Mekanisme Penyusunan RKA

Diperlukan penyempurnaan standar operasional prosedur penyusunan RKA agar setiap unit kerja memiliki pedoman yang lebih jelas, seragam, dan mudah diterapkan. SOP perlu diselaraskan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan operasional, dan dinamika penggunaan aplikasi SIPD.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Secara Berkelanjutan

Pelatihan teknis mengenai penyusunan RKA, penganggaran berbasis kinerja, dan pemanfaatan SIPD perlu dilakukan secara periodik agar kemampuan pegawai terus meningkat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi atau teknologi.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi perlu terus diperluas, baik melalui penggunaan platform kolaboratif, penguatan basis data kebutuhan operasional, maupun integrasi dengan sistem perencanaan lainnya. Hal ini penting untuk mempercepat proses penyusunan dan meningkatkan akurasi data.

4. Peningkatan Koordinasi Lintas Bidang dan OPD Terkait

Diperlukan forum koordinasi rutin antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan BPKAD, serta unit-unit internal agar sinkronisasi program dan kegiatan berjalan efektif. Komunikasi yang terbuka dan konsisten akan memperkuat ketepatan perencanaan.

5. Evaluasi Berkala terhadap Mutu Dokumen RKA

Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyusunan RKA harus terus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, menilai efektivitas strategi yang diterapkan, dan memastikan bahwa setiap usulan anggaran benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil lapangan.

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax: 0711-360986 Kode Pos 30131

Palembang, 22 Oktober 2025

Nomor : 005 / 05 /DPKP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth. Tim Efektif Aksi Perubahan
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Implementasi Pelaksanaan Aksi Perubahan Strategi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025 dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Acara : Rapat Tim Efektif dalam Rangka Persiapan Aksi Perubahan Strategi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DPKP Kota Palembang

M. Irfan Tawakib L. S.STP., M.Si
NIP. 199706052018081002

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax: 0711-360986 Kode Pos 30131

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Acara : Rapat Tim Efektif dalam Rangka Persiapan Aksi Perubahan Strategi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tri Saptawan S.STP., M.H	Sekretaris DPKP	1. 
2	M. Irfan Tawakib L. S.STP., M.Si	Kasubag PP	2. 
3	Abdul Wahyuni, S.Sos., M.Si	Kasubag Urupang	3. 
4	Intan Cahya Mada S.Kom	Staff PNS	4. 
5	Dian Ulari Puri	Staff PPK	5. 
6	Tahdy Cahya Widayanti	Staff PPK	6. 
7	Vikram Jusantini	PJLP	7. 
8	Indah Putri Nellyah Dama	PJLP	8. 
9	Marshalli Lw Jari	PJLP	9. 
10	Ald Nugri Hindulrah	PJLP	10. 
11	Hendri Berta Zakaria, S.H., M.H	Kasubag Keuangan	11. 
12	Emmangint	Staff PNS	12. 
13	Rico Butersyah	Staff PPK	13. 
14	Muhammad Atallah, A.Hd	Staff PNS	14. 

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax: 0711-360986 Kode Pos 30131

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Acara : Rapat Tim Efektif dalam Rangka Persiapan Aksi Perubahan Strategi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Pimpinan Rapat : Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si

1. Agenda Rapat:

- Persiapan konsep aksi perubahan
- Pembahasan rencana kerja aksi perubahan dan penentuan jadwal pelaksanaan

2. Peserta Rapat:

Rapat dihadiri oleh anggota Tim Efektif (daftar hadir terlampir)

3. Hasil Rapat:

- Pemaparan aksi perubahan
 - Aksi Perubahan dengan Judul "Strategi Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang"
 - Tujuan Aksi Perubahan diharapkan agar setiap bidang dapat melakukan penginputan RKA secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil masing – masing unit kerja
- Rencana Kerja aksi perubahan

Telah disepakati tahapan pelaksanaan aksi perubahan sebagai berikut :

 - Pembentukan Tim Efektif
 - Pemintaan Operator disetiap bidang
 - Dilakukan sosialisasi dan implementasi
 - Monitoring dan Evaluasi

4. Penutup:

Pimpinan rapat menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam mendukung aksi perubahan ini, demi peningkatan penginputan RKA yang efektif dan efisien.



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax: 0711-360986 Kode Pos 30131

Palembang, 24 November 2025

Nomor : 800.1/15/DPKP/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Permohonan menjadi narasumber
untuk sosialisasi mengenai strategi
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)

Yth. Kepala BPKAD
di
Palembang

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2025 atas nama Muhammad Irfan Tawakib Lubis, S.STP., M.Si mengenai Strategi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, bermaksud untuk meminta ASN terkait dalam hal tersebut pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menjadi narasumber pada sosialisasi yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 25 November 2025
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Acara : Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Palembang



Kemas Haikal, S.Kom
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19791112010011014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Merdeka No. 8 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-312011, 113, Fax: 0711-360986 Kode Pos 30131

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 25 November 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
Acara : Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang

NO	NAMA	NOMOR WA	TANDA TANGAN
1			1.
2			2.
3			3.
4	Rico	082102643155	4. Rico
5	M. Noehly	081272406377	5. Cze
6	Yanuar Achmad	BPKAD	6. 9
7	Paya	BPKAD kua Rg	7. f
8	Suryadi	082176251043 BPKAD	8. S
9	FIRMAN	081211409222	9. RKA
10	Satria Galing M.	0856013593	10. Sba
11	Irfan	082379548619 0827355789	11. Irfan
12	Wiwiek Andriyani	08117882612	12. Wia
13	Widya Asih	08161509155	13. WdA
14	Puti Nur Kholah	08114199218	14. W
15	Tora	082185960811	15. Tora

16	ENDY HIDAYAT	08127056960	16. R	
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.
21				21.
22				22.
23				23.
24				24.
25				25.
26				26.
27				27.
28				28.
29				29.
30				30.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Palembang

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan DPKP Kota Palembang

Kemas Haikal, S.Kom
NIP. 19791112010011014

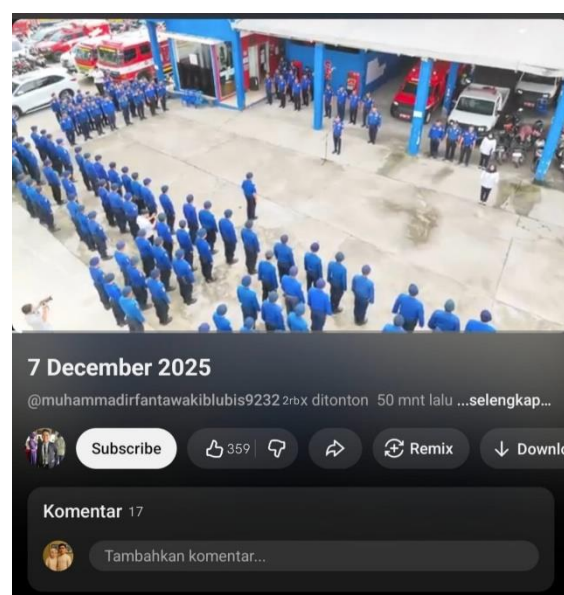
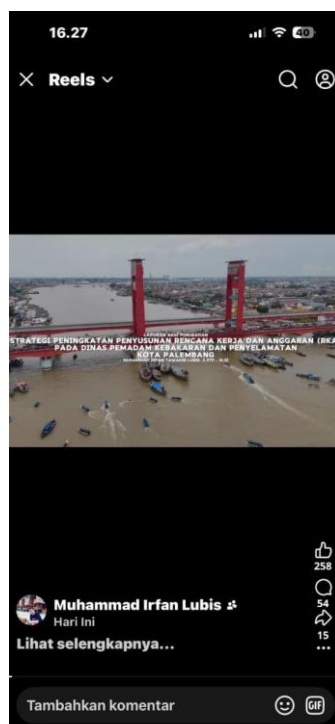
M. Irfan Tawakib L., S.STP., M.Si
NIP. 199706052018081002

Link Template RKA :

<https://drive.google.com/drive/folders/1NqttKFmZ7eSNYYUG8ViOL-b3l3-UjRDV?usp=sharing>

NO	URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Belanja ...	214	14	ORANG/BULAN	Rp 1,000.00
2	Belanja ...	214	14	ORANG/BULAN	Rp 1,000.00
3	Belanja ...	214	14	ORANG/BULAN	Rp 1,000.00
4	Belanja ...	214	14	ORANG/BULAN	Rp 1,000.00
5	Belanja ...	214	14	ORANG/BULAN	Rp 1,000.00

SCREENSHOOT UPLOAD VIDEO PADA FACEBOOK DAN YOUTUBE



DAFTAR PUSTAKA

Presiden Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.*

Presiden Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Presiden Republik Indonesia. 2014. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional*

Menteri Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.*

Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang.*

Widiastuti, Widya. 2021. *Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kantor Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.* Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021.